

PROSPEK PENGEMBANGAN SYARA' DALAM GERAKAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN MAJENE

H. Abubakar Surur

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988, disebutkan bahwa "Peranan dan tanggungjawab dalam rangka gerakan keluarga berencana, baik perorangan maupun masyarakat, perlu makin didorong dan diperkuat dengan semakin melibatkan organisasi dan pemuka masyarakat serta pihak-pihak swasta, sehingga pengelolaan dan pelaksanaan keluarga berencana dapat semakin memasyarakat" (GBHN-1988). Berbagai upaya dilakukan oleh lembaga resmi pengelola keluarga berencana selama ini, untuk merangsang keagairahan dan keikutsertaan masyarakat dalam rangka kesuksesan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, antara lain dengan mendorong dan memberikan peran yang lebih nyata pada potensi yang ada dalam masyarakat untuk turut mengambil peranan yang sesuai dengan bidangnya, melalui instansi yang ada dan berkembang dalam masyarakat tersebut serta memberikan dukungan kepada institusi masyarakat untuk menjadi wadah kegiatan masyarakatnya sendiri melalui berbagai kegiatan.

Khusus di Sulawesi Selatan, berbagai kegiatan yang dilakukan BKKBN dengan melibatkan dan memanfaatkan lembaga tradisional masyarakat dalam rangka memasyarakatkan gerakan keluarga berencana, dan hasilnya cukup berarti dalam meningkatkan persentase pencapaian target peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif. Salah satu upaya tersebut, memanfaatkan pranata sosial keagamaan

yang secara tradisional tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah syara'.

Syara' adalah salah satu institusi keagamaan khas masyarakat Sulawesi Selatan yang paling akrab berhubungan dengan masyarakat untuk melayani kepentingan mereka, baik yang menyangkut urusan sosial keagamaan maupun urusan ibadah.

Apabila syara' di fungsikan secara nyata dan dilibatkan langsung dalam kegiatan gerakan keluarga berencana, akan sangat membantu kesuksesan pelaksanaan gerakan keluarga berencana serta pencapaian target KB di daerah ini.

Untuk keperluan itulah maka penelitian "Prospek Pengembangan Syara dalam Gerakan Keluarga Berencana di Kabupaten Majene" dilaksanakan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui informasi tentang kemungkinan pemanfaatan syara' dalam menunjang suksesnya pelaksanaan gerakan KB di Kab. Majene. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi 2 tujuan khusus, yaitu : (1) memperoleh informasi yang faktual dan akurat tentang tugas dan peranan syara', sebagai lembaga sosial keagamaan masyarakat, dan (2) memperoleh informasi, sejauhmana kemungkinan pemanfaatan syara' sebagai penunjang kesuksesan gerakan KB tersebut.

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bermakna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, menambah khazanah disiplin ilmu terkait, baik dilihat dalam pengembangan masing-masing disiplin, maupun dalam konteks pemanfaatan berbagai disiplin dalam pendekatan terpadu untuk menganalisis serta memecahkan masalah-masalah sosial.

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Majene, sebagai daerah sampel untuk komunitas Mandar. Responden penelitian adalah aparat syara' yang ada dalam 2 kecamatan, masing-masing Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yang dipilih secara selektif dengan mengutamakan imam kelurahan/imam desa aparat syara' lainnya.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung dan observasi partisipasi. Disamping itu, penelitian juga menggunakan alat berupa pedoman wawancara, panduan tugas lapangan dan kuesioner.

Teknik lainnya yang dipergunakan untuk memperoleh data, ialah studi pustaka dan penelusuran dokumentasi.

Selain dengan responden, penelitian juga melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama serta pejabat instansi terkait di lokasi penelitian.

Data yang terkumpul, setelah diolah, dianalisis dengan analisis kualitatif-naratif serta dicari interpretasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene dengan lokasi sampel di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang.

Letak kedua kecamatan tersebut berada pada kawasan pantai yang memanjang dari

timur pada batas Kabupaten Polmas ke barat pada batas Kecamatan Sendanaka. Majene, dan diapit dengan Teluk Mandar di sebelah selatan dan Bukit di sebelah utara, menjadikan kedua kecamatan ini memiliki alam yang indah dan pemandangan yang menarik, terutama bila kita berada di tempat ketinggian akan nampak keindahan alamnya yang merupakan bagian dari keindahan alam Sulawesi Selatan.

Melihat letak kedua kecamatan ini sebagai daerah kawasan pantai, maka tanah persawahan tidak ditemukan, sehingga beras sebagai makanan pokok penduduk, didatangkan dari kecamatan dan daerah lain seperti Polmas dan Pinrang. Tanah perkebunan menghasilkan berbagai tanaman jangka panjang seperti kelapa sebagai hasil utama dan tanaman jangka pendek seperti palawija jagung, sayur-sayuran, dsb.

Administrasi pemerintahan Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang sama dengan kecamatan lainnya di Kab. Majene masing-masing dipimpin seorang Camat, hanya pemerintahan desa yang ada di kedua kecamatan ini berbeda. Kecamatan Banggae terdiri dari 5 kelurahan, masing-masing (1) Kelurahan Banggae, (2) Kelurahan Labuang, (3) Kelurahan Totoli, (4) Kelurahan Baruga, (5) Kelurahan Tande.

Kecamatan Pamboang terdiri 1 kelurahan dan 5 desa, masing-masing : (1) Kelurahan Lalampanua, (2) Desa Bondu, (3) Desa Bababulo, (4) Desa Simbang, (5) Desa Andolang dan (6) Desa Betteng.

Penduduk masing-masing kecamatan, adalah ; Kecamatan Banggae (1989) berjumlah 54.701 jiwa terdiri dari laki-laki 26.723 orang dan wanita 28.178 orang. Kecamatan Pamboang (1889) berjumlah

23.109 orang, terdiri dari laki-laki 10.701 orang dan wanita 12.408 orang.

Pendudukkeduakecamatan seluruhnya beragama Islam. Adapun yang menganut selain dari agama Islam, hanya pendatang yang tidak menetap.

Kehidupan beragama masyarakat Banggae dan Pamboang, adalah suku Mandar yang teguh melaksanakan ajaran agama.

Segala aspek kehidupan dan kegiatan mereka, mulai dari perkawinan, kelahiran, menaiki rumah baru, turun sawah, dan kegiatan daur hidup lainnya, masih diwarnai dengan ritual keagamaan, dan discus&i-kan dengan ajaran Islam.

Kegairahan melakukan ajaran agama telah dibina sejak lama, terbukti dengan kata "Majene" adalah bahwa Mandar yang artinya "berwudhu". Menurut Fakhruddin Kamil (wawancara 17-11-1990) mengemukakan :

"Ketika Belanda pertama kali menginjakkan kaki di daerah ini, Islam sudah berkembang, mereka menemukan masyarakat - orang Islam sedang mengambil air wudhu.

Belanda kemudian bertanya kepada mereka dengan bahasa Belanda yang maksudnya menanyakan nama daerah ini.

Orang Islam saat itu mengira, yang ditanyakan adalah apa yang mereka lakukan itu sehingga mereka menjawab "majjenne" (sedang berwudhu). Orang-orang Belanda itu kemudian memberi nama daerah ini "Majene".

Sejarah keberadaan Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang, tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Majene secara keseluruhan. Kabupaten Majene,

berasal dari Kerajaan Mandar yang muncul dalam abad ke 15, yang tergabung dalam kerajaan yang bernama "Pitu Babana Binanga", yaitu gabungan dari tujuh kerajaan, masing-masing : (1) Kerajaan Balanipa, (2) Sendana, (3) Banggae, (4) Pamboang, (5) Tapalang, (6) Mamuju, dan (7) Kerajaan Binuang.

Pemrintah tertua dari Kerajaan Mandar dinamakan "Tomekaka". Pada masa pemerintahan Tomekaka belum terdapat aturan-aturan dan hukum bagi seluruh rakyat, sehingga perang sering terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang dipimpin tomekaka masing-masing kerjaan. Kemudian Tomekaka digantikan oleh "Pappuangan" yang merupakan perubahan keadaan masyarakat dan sudah memiliki hukum dan aturan-aturan yang mengatur sistem kemasyarakatan. Selanjutnya Pappuangan diganti dengan pemerintahan "Arajang". Aturan-aturan, hukum dan kemasyarakatan yang telah diltakkan Pappuangan, dikembangkan, sehingga arajang ini mampu bertahan sampai pada masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemrintah arajang mempunyai badan atau lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab pada arajang, yaitu :

- a. Adaq Sappulo Soko, sebagai Dewan Menteri, dipimpin oleh Maraddia Malolo (Perdana Menteri).
- b. Appe Banua Kayyang, yaitu (Napo, Samasundu, MossodanTodang-todang) adalah daerah yang mempunyai hak dan wewenang memilih dan memberhentikan arajang dan anggota Adaq Sappulo Soko dan membina kehidupan demokrasi dalam Arajang Mandar.

c. Appe Jamangang, yaitu suatu dewan yang menangani masalah-masalah pertahanan keamanan dengan membina bala tentara keamanan, yang terdiri dari:

- 1) Andongguru Pakkabusq (pasukan berani mati)
- 2) Andongguru Passinapa (pasukan bersenapang)
- 3) Andongguru Paqburasang (pasukan sumpit) dan
- 4) Andongguru Joaq matoa (pasukan pnyerang).

Disamping itu pemerintah Arajang Mandar dilengkapi dengan suatu dewan yang terdiri dari masyarakatpelaot yang disebutSakkaq manarangdenganjabatan "Sawwanar" yang mengurus lalu lintas laut.

PadamasakekuasaanpenjajahBelanda (1908) dibentuk Ai'deling Mandar yang terdiri dari 4 ondcrafaf deling, masing-masing : Mamuju, Majcne, Polcwali dan Mamasa. Kcmudian pada masa kemerdekaan, sesudah Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, maka Ondcrafdeling Majenc diubah menjadi daerah tingkal II dengan nama "Dati II Kabupaten Majenc dipimpin seorang Bupati dan dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae, Pamboang, Scndana dan Kecamatan Malunda.

III

Keberadaan syara' di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang, adalah bagian keberadaan syara di Kabupaten Majene secara keseluruhan, bermula sejak kerajaan Mandar menerima Islam sebagai agama kerajaan, ketika Daeng Tamelanlo memcngang tampuk kerajaan. Ketika itu dibentuk satu lembaga yang mengurus

masalah keagamaan (Islam) yang dinamakan sara'. Seperti halnya kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang pada umumnya menganut sistim "pangadereng", di Kerajaan Mandar, dianut pula 2 sistim pangadereng yang oleh orang Mandar menyebutnya "adaq", dimana syara' termasuk salah satu unsur, yaitu : ada', rapang, wari, bicara dan sara'. Syara' dipimpin seorang Qadhi, qlch kerajaan Mandar menyebutnya "Maraddia Sara".

Scsuai permintaan Daeng Tamelanlo ketika ia diminta unluk menggantikan ayahandanya sebagai raja di Banggae (abad 17), ia juga mcrangkap Maraddia Syara' (kadhi) dibantu oleh perangkat Syara' yang terdiri dari imam, khalib, bilal dan doja (khadim).

Adapun keterkaitan antara ada' dan Syara' di Kerajaan Mandar, dalam lontarak disebutkan :

"Bainemi saraqmuanemi adaq, adaqmo maandc cuke, saraqmo maande pittara. Naiyya ingganna nabicara adaq, ingganna toitia naissang saraq. Naiyya saraq, adaq nala gasing naiya adaq saraq nala sulo. Matci adaq muandiang saraq, matctoita saraq uandiang adaq".

Aninya : Syara' dianggap sebagai wanita dan ada' sebagai pria. Ada' wewenang dibidang cukai, syara' urusannaya adalah zakat fitrah. Wewenang ada' tidak boleh dicampur syara', wewenang syara' tidak boleh diurus ada' Kekuatan syara' adalah ada', ada' bersandar pada syara'. Ada' tidak mempunyai arti tanpa syara' dan syar' tidak ada arti tanpa ada'

Lembaga syara'diberikan berbagai fasilitas, dan tidak dibebani seperti anggota masyarakat lainnya, bahkan syara' duduk

berdampingan dengan raja, hal ini dapat dilihat pada saat diadakan upacara-upacara. Bahkan pada upaya "mappacci" dalam perkawinan, maraddia sara' yang pertama hams melakukannya, baru diikuti maraddia adaq (raja) karena termasuk fungsi dan wewenangnya. Setelah itu barulah diikuti oleh tokoh dan pemuka masyarakat lainnya, yang menurut adat, mappacci itu dilakukan minimal 7 orang.

Integrasi syara' kedalam adaq sejak Islam menjadi agama kerajaan Mandar, dapat dilihat pada saat pengangkatan seorang raja ketika dinobatkan didahului dengan pengucapan sumpah, yang dilakukan oleh maraddia sara'. Naskah sumpah sebagai berikut :

"Mapparentami Mandar sallami paqbanua sallah tomapparenta, dianggo tosallang miolo dipuanga anna damo muwata-watai, nasaba iamotuu miolo dipuanga anna damo muwata-watai, nasaba iamotuu ditingo nawalimi paqbanua, mapparentamoo paqbanua, tapi mua salao diditotuu malai".

Artinya Mulailah memerintah kerajaan mandar rakyatnya yang beragama islam dan pemerintahannya beragama Islam yang bertaqwa kepada Tuhan, maka janganlah ragu-ragu karena itulah yang menjadi peggangan. Maka dijawablah oleh rakyat, tetapi apabila raja melakukan kesalahan, maka akan diusir".

Syara' pada masa kerajaan dan masa penjajahan di Majene, sebagai institusi keagamaan, tetap diakui sebagai lembaga yang berdampingan dengan ada'. Qadhi tetap menjalankan perannya sebagai maraddia sara' secara penuh.

Setelah kemerdekaan diperoleh, ter-

lebih lagi setelah Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, sebagian fungsi syara' diintegrasikan kedalam struktur pemerintahan, seperti urusan nikah, talak, cerai dan rujuk diurus oleh Kantor Urusan Agama, urusan kewarisan dilimpahkan kepada Pengadilan Agama, pendidikan agama dikelola oleh Pendidikan Agama dan madrasah/ponok psantren dibina oleh perguruan Agama.

Namun, peranan aparat syara' dalam menangani berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat, masih sangat dominan dan perhatian masyarakat terhadap syara' masih besar.

Masyarakat Mandar yang merupakan penduduk asli Kabupaten Majene, khususnya Kecamatan Banggae dan Pamboang, upacara-upacara tradisional masih mewarnai setiap kegiatan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan senantiasa dikaitkan dengan ritual keagamaan. Apalagi upacara sosial keagamaan seperti aqiqah, perkawinan, selamatan dan sebagainya, pada umumnya dilakukan oleh syara'.

Menurut Andi Cinta (Ex Pabbicara Kayyang) Mengatakan :

Keterlibatan syara' dalam berbagai upacara keagamaan dan daur hidup masyarakat mutlak adanya, tanpa syara' biasanya upacara tidak dapat dilakukan, maka setiap keluarga yang berniat akan melakukan hajat, harus lebih dahulu meminta kesediaan syara', barulah ditentukan waktu pelaksanaannya" (Wawancara tgl. 18-11-1990).

Imam sebagai jabatan informal bersama pembantu-pembantunya, yang dikenal dengan aparat syara', bagi masyarakat tetap memandang mereka sebagai pemimpin dan panutan, yang mampu menangani

segala aktifitas keagamaan mereka. Syara' senantiasa didatangi untuk dimintai nasehatnya, memenuhi pelepasan hajat mereka, membaca do'a, mengurusijcnazah, mendirikan rumah dan pindah rumah, bahkan oleh masyarakat menggantungkan harapan mereka untuk membimbing anak-anak mereka mempelajari Al-qur'an, melaksanakan khataman sampai pada urusan khitanan anak-anak mereka.

Informasi yang diterima peneliti dari para imam di Kecamatan Banggae dan Pamboang selaku aparat syara', seluruhnya mengatakan bahwa pekerjaan utama mereka adalah imam walaujabatan itu tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka dan diantara mereka ada yang bertani, nelayan pengrajin dan pengusaha, yang ternyata dari pekerjaan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi pekerjaan mereka tekuni itu, dianggap pekerjaan sampingan dan imam dianggap pekerjaan pokok.

Kenyataan yang ditemukan peneliti, bahwa yang mendorong para imam untuk menjadi aparat syara', baik sebagai imam kelurahan/desa ataupun imam dusun/kampung atau imam masjid, adalah karena mereka menganggap syara' itu adalah pekerjaan mulia, karena langsung menyentuh kebutuhan spritual masyarakat. Mereka bcrkeyakinan bahwa apabila pekerjaan syara' ini dilaksanakan dengan baik dan ikhlas, maka Allah akan memberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat.

IV

Pada mulanya, pelaksanaan Program keluarga Berencana sebagai Program Nasional, di Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Banggae dan Pamboang, pe-

tugas lapangan KB mengalami tantangan berat, karena yang dihadapi adalah masyarakat Islam yang sangat kuat mematuhi ajaran agamanya.

Informasi yang diterima peneliti dari petugas, bahwa mereka dalam menjalankan tugasnya, senantiasa mengalami hambatan, bahkan ada diantara mereka yang nyaris korban. Namun, keuletan dan ketabahan mereka dalam melaksanakan tugasnya, maka tantangan dan hambatan berangsur-angsur dapat diatasi, berkat adanya kerjasama petugas lapangan KB dengan berbagai unsur, termasuk aparat syara'.

Data diperoleh peneliti pada dua kecamatan tersebut, sesuai keadaan 1989, menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap gerakan KB, ternyata di Kecamatan Banggae terdapat sejumlah 4.821 orang yang telah menjadi akseptor, yaitu 7,79 % dari jumlah penduduk, dan di Kecamatan Pamboang terdapat 1.329 akseptor, yaitu 5,75 % dari jumlah penduduk.

Adapun alat kontrasepsi yang digunakan akseptor bervariasi sebagai berikut:

Kecamatan Banggae (1989): Pil 2.850 orang, Kondom 55 orang, Obat Vaginal 100 orang, Tubektomi 24 orang, Vasektomi 1 orang, Suntikan 939 orang dan IUD 312 orang. Kecamatan Pamboang (1989): Pil 748 orang, Kondom 3 orang, Vasektomi 3 orang, Suntikan 497 orang, IUD 30 orang, Lain-lain 48 orang.

Dari data tersebut, ternyata akseptor pada kedua kecamatan tersebut lebih banyak menggunakan pil, menyusul suntikan baru lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banggae dan Pamboang yang kuat memegang ajaran agama dan tradisi agama, sangat hati-hati memilih alat

kontrasepsi karena senantiasa dihubungkan dengan hukum agama. Diperoleh informasi dari imam, bahwa selain alat kontrasepsi yang secara formal digunakan masyarakat sebagai partisipasi mereka dalam Gerakan KB, adajuga yang menggunakan cara spiritual berupa jimat, disamping itu ada juga yang melakukan azal dan sistem kalender.

Peranan syara' dalam Gerakan KB di Kecamatan Banggae dan Pamboang, mcrcka telah berpartisipasi aktif, dalam pclk-sanaannya, baik mereka sebagai akseptor maupun sebagai anggota tim penyuluh.

Penyuluhan dilakukan minimal sckali setiap triwulan oleh petugas lapangan KB dalam bentuk tim, dimana aparat syara' diikutsertakan, bukan hanyasebagai anggota tim, tetapi berperan aktif memberikan penyuluhan, demi suksesnya gerakan keluarga berencana ini sebagai tugas nasional.

Diperoleh data oleh peneliti, bahwa sebagian besardari imam (imam desa, kelurahan, dusun dan imam masjid) telah menjadi akseptor. Dari 30 imam selaku responden pada dua kecamatan tersebut, 25 orang diantaranya masih menjadi akseptor, sedang 5 orang lainnya tidak menjadi akseptor lagi karena usia lanjut, baik suami maupun istrinya, sehingga mereka tidak melakukan hubungan scbagai suami istri. Data tersebut mcnunjukkan bahwa aparat syara' lurut memberi andil dan memberi arti akan suksesnya Gerakan KB di dacrach ini.

Masyarakat Kecamatan Banggae dan Pamboang telah menerima dan melaksanakan Gerakan KB tanpa hambatan berarti, berkat kerjasama yang telah terjalin antara petugas KB dengan aparat syara' melalui penyuluhan, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat Gerakan KB, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun sosial keagamaan masyarakat.

Aparat syara', disamping sebagai anggota tim yang dikoordinis oleh Petugas Lapangan Gerakan KB, juga melakukan penyuluhan pada saat mereka melaksanakan tugas syara', pada acara-acara kemasyarakatan, seperti aqiqah, perkawinan, khitanan, selamatan dan lain-lain upacara yang dianggap ada kaitannya dengan Gerakan KB, dan hal ini dilakukan aparat syara' di luar tim.

V

Eksistensi Institusi Syara'di Kabupaten Majenc telah ada sejak Kerajaan Mandar menerima Islam sebagai agama kerajaan, kctika Dacng Tamelanto mcmcngang tampuk kerajaan, pada abad 17.

Syara' sebagai lembaga keagamaan, masih bcrfungsi, sejak zaman kerajaan, dan zaman penjajahan, sampai pada zaman kemerdekaan, walaupun sctelah kemerdekaan dicapai, tugas syara' sudah masuk dalam bidang tugas Departemen Agama, tetapi masih banyak unsur-unsur keagamaan yang ditangani aparat syara'. Aparat syara' yang tcrdiri dari imam (kelurahan/desa/dusun dan masjid), tetapi dibutuhkan masyarakat dalam melayani kegiatan spiritual keagamaan mereka, yang belum terjangkau oleh Departemen Agama, sehingga syara' masih dibutuhkan keberadaannya.

Fungsi syara' adalah menangani masalah-masalah keagamaan, disamping menjadi panutan dan tempat menggantungkan harapan dalam berbagai aspek kchidupan masyarakat.

Pcranan mereka dalam Gerakan KB di Kec. Banggae dan Pamboang, mempunyai arti penting, karena turut menentukan keberhasilan Gerakan KB, dengan ikutsertanya mcrcka dalam penyuluhan, pelayanan dan pclkaksanaan Gerakan KB itu sendiri.

KEPUSTAKAAN

- BPLK, Laporan Hasil Penelitian Masuknya Islam di Sulawesi Selatan, BPLK, Ujungpandang, 1985/1985.
- BKKBN, Membina Kemaslahatan Keluarga, BKKBN, Jakarta, 1982.
- Koentjaraningrat, Pro. DR, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Saharuddin, Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar dalam Lintasan Sejarah Pemda Sulsel), CV. Mallomo Karya, Ujungpandang, 1985.
- Sinrang, Andi Saiful, Mengenal Mandar Sekilas Lintas, Ujungpandang, t. th.
- Tandilinting, dkk., Ungkapan Tradisional yang ada kaitannya dengan Silsilah dalam Pancasila, Propinsi Sulawesi Selatan, Depdikbud, Ujungpandang, 1984.
- Tuande Maricar Sahib, DR.H., Makalah "Islam dan Keluarga Berencana, LKKNU, Ujungpandang, 1990.